



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DEVI ARIKA HAPSARI
2. Jabatan : PENGELOLA AKOMODASI DAN KONSUMSI
3. NHK : 140087

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.858.860.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m<sup>2</sup>/72 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 449.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m<sup>2</sup>/160 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 183 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.280.000.000
4. Tanah Seluas 132 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 216.000.000
5. Tanah Seluas 91 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 213.860.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 512.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 268.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 246.000.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 765.861.292**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 4.382.721.292



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.382.721.292

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.